



Intervensi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Menyelesaikan Konflik Suriah

Roby Arman Myajaya¹, Zaini², Peni Hanggarini³

¹ Paramadina Graduate School of Diplomacy

² Paramadina Graduate School of Diplomacy

³ Paramadina Graduate School of Diplomacy

Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam memediasi konflik Suriah yang berlangsung sejak 2011. Fokus penelitian terletak pada identifikasi tantangan utama yang dihadapi OKI, meliputi perbedaan kepentingan antarnegara anggota, kompleksitas konflik yang diperparah oleh keterlibatan kekuatan eksternal, serta keterbatasan dalam menyeimbangkan prinsip hukum internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis analisis dokumen dengan kerangka teori diplomasi, konsep mediasi konflik internasional, dan liberalisme institusionalisme. Data dikumpulkan dari laporan resmi, literatur akademik, dan sumber sekunder lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi OKI terhambat oleh perpecahan internal antarnegara anggota dan pengaruh eksternal yang kuat, terutama dari Rusia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa OKI perlu mengembangkan strategi berbasis solidaritas yang lebih adaptif dan kolaboratif untuk memperkuat perannya dalam penyelesaian konflik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengayaan literatur tentang diplomasi multilateral, mediasi konflik internasional, dan liberalisme institusionalisme.

Keywords: OKI, konflik Suriah, diplomasi, mediasi internasional, liberalisme institusionalisme

1. Latar Belakang

Intervensi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam menyelesaikan konflik di negara-negara Islam, khususnya Suriah, menghadapi tantangan besar. OKI, yang terdiri dari negara-negara Muslim, berperan penting dalam diplomasi dan mediasi, serta berusaha menggalang dukungan internasional untuk mengatasi konflik. Dalam konteks Suriah, OKI telah berupaya memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bertikai, termasuk pemerintah Suriah dan kelompok oposisi, dengan tujuan mencapai solusi damai yang langgeng (Sundari & Rahman, 2021).

Tantangan utama yang dihadapi OKI adalah adanya perbedaan kepentingan yang signifikan di antara negara-negara anggotanya. Beberapa negara mendukung rezim Assad, sementara yang lain mendukung kelompok oposisi. Keberagaman pandangan ini menyulitkan koordinasi dan kesepakatan, yang pada gilirannya menghambat upaya OKI untuk

menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak (Kusmin, 2023). Oleh karena itu, OKI harus mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan kolaboratif agar dapat mengatasi dinamika internal yang ada dalam organisasi.

Selain itu, prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional sangat penting untuk diperhatikan. Kedaulatan negara merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak warganya serta memenuhi kewajiban internasional, yang perlu dihormati dalam setiap upaya intervensi. Dalam hal ini, OKI berperan untuk mendorong negara-negara anggotanya agar tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional dan bertindak sesuai dengan tanggung jawab tersebut (Sigit, 2012).

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam upayanya menyelesaikan konflik Suriah yang telah berlangsung sejak 2011. Salah satu kendala utama adalah perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggota. Setiap negara memiliki pandangan dan prioritas nasional yang

beragam terkait konflik ini, yang sering kali menghambat tercapainya solusi kolektif. Contohnya, perbedaan posisi antara Arab Saudi dan Iran dalam mendukung pihak-pihak tertentu di konflik Suriah menciptakan ketegangan internal dalam organisasi (Sundari et al., 2021). Ketidaksepakatan ini membuat OKI sulit bersatu dan bertindak secara efektif.

Selain itu, legitimasi dan pengaruh OKI di tingkat internasional juga menjadi tantangan utama. Meskipun mewakili negara-negara Muslim, pengaruh OKI dalam menyelesaikan konflik Suriah sering kali dianggap lemah dibandingkan organisasi seperti PBB atau kekuatan besar negara Barat. Akibatnya, dukungan internasional terhadap inisiatif mediasi OKI menjadi terbatas (Heriamsal, 2024). Bahkan, keputusan yang diambil oleh OKI sering kali diabaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, yang semakin melemahkan posisi organisasi sebagai mediator.

Keterbatasan sumber daya dan kapasitas OKI untuk menangani krisis kemanusiaan akibat konflik juga menjadi hambatan. Walaupun memiliki mandat membantu negara-negara anggotanya dalam situasi krisis, OKI sering kali kekurangan dana dan tenaga manusia yang memadai. Banyak negara anggota juga menghadapi masalah ekonomi dan sosial di dalam negeri, sehingga sulit untuk menyediakan dukungan bagi Suriah (Laksono, 2024). Hal ini menyebabkan respons kemanusiaan OKI terhadap konflik Suriah menjadi kurang memadai.

Kompleksitas konflik Suriah, yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda, turut menambah tantangan bagi OKI. Konflik ini tidak hanya melibatkan pemerintah Suriah dan kelompok oposisi, tetapi juga aktor eksternal seperti Rusia, Amerika Serikat, dan Iran dengan agenda masing-masing. Kondisi ini menciptakan dinamika yang sangat rumit, di mana OKI harus berusaha menjembatani perbedaan di antara pihak-pihak yang saling bertentangan (Pratiwi, 2024). Situasi ini sering kali menempatkan OKI dalam posisi sulit untuk bertindak sebagai mediator yang efektif.

Tantangan lain yang dihadapi OKI adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi di antara negara-negara anggota. Dalam konflik kompleks seperti Suriah, penting bagi anggota OKI

memiliki mekanisme koordinasi yang baik dan saluran komunikasi yang efektif. Namun, perbedaan pandangan dan posisi sering kali menghambat tercapainya konsensus, yang akhirnya mengurangi efektivitas diplomasi OKI (Sarjito, 2023).

Terakhir, legitimasi dan penerimaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menjadi tantangan yang tidak kalah penting. OKI perlu membangun kepercayaan dari semua pihak, termasuk pemerintah Suriah dan kelompok oposisi, agar upaya mediasi dapat berjalan efektif. Tanpa kepercayaan ini, sulit bagi OKI untuk mencapai solusi yang diterima semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan strategi mediasi yang lebih inklusif dan transparan agar semua pihak merasa diakui dalam proses penyelesaian konflik (Isyanawulan, 2023).

OKI juga dapat mengadopsi pendekatan berbasis komunitas dalam penyelesaian konflik, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses mediasi. Penelitian menunjukkan bahwa melibatkan masyarakat lokal dapat menghasilkan solusi yang lebih relevan dan diterima oleh semua pihak, serta lebih berkelanjutan (Adiansah & Sari, 2021). OKI dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi lokal untuk memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terdampak, sehingga solusi yang dihasilkan lebih tepat sasaran.

Tidak kalah penting, ajaran Islam sendiri menekankan perdamaian dan rekonsiliasi. Sebagai organisasi yang mewakili negara-negara Muslim, OKI dapat memanfaatkan nilai-nilai Islam tersebut untuk mempromosikan dialog antaragama dan meredakan ketegangan di Suriah (Anwar, 2022). Dengan berpegang pada ajaran Islam yang mendukung perdamaian, OKI dapat menjadi jembatan untuk membuka ruang bagi dialog yang konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

OKI juga harus mendapatkan dukungan dari komunitas internasional. Kolaborasi dengan organisasi internasional lainnya, seperti PBB, akan memperkuat legitimasi dan efektivitas upaya mediasi yang dilakukan. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar organisasi internasional meningkatkan peluang untuk mencapai solusi damai yang lebih berkelanjutan (Sos, 2020). Oleh karena itu, OKI harus terus berupaya membangun kemitraan yang solid

dengan berbagai pihak internasional untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelesaian konflik Suriah.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam menyelesaikan konflik di Suriah. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan deskripsi dan interpretasi yang mendalam terkait dinamika konflik serta upaya resolusi yang dilakukan oleh OKI (Setiawan et al., 2020).

Tulisan ini menggunakan desain studi kasus yang berfokus pada konteks spesifik konflik Suriah dan peran OKI dalam proses penyelesaiannya. Sebagaimana diuraikan oleh Cassel dan Simon, metode kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan makna gejala yang terjadi dalam konteks sosial secara akurat (Setiawan et al., 2020). Melalui pendekatan ini, tulisan ini akan menganalisis secara mendalam latar belakang konflik, status terkini, serta interaksi berbagai elemen dalam upaya resolusi konflik oleh OKI (Maharani et al., 2021).

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, dokumen resmi, serta sumber berita terkait konflik Suriah dan keterlibatan OKI dalam upaya resolusinya (Mukhtar & Triana, 2023).

3. Kerangka Teoritis

3.1 Teori Diplomasi

Teori diplomasi memegang peranan penting dalam memahami peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam menyelesaikan konflik Suriah yang berlangsung sejak 2011. Diplomasi, sebagai seni dan praktik negosiasi antarnegara, bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mengurangi ketegangan internasional. Dalam konteks Suriah, pendekatan diplomasi multilateral oleh OKI mencerminkan upaya negara-negara Muslim untuk bekerja sama menghadapi tantangan yang menimpa salah satu anggotanya.

Penelitian mengungkapkan bahwa diplomasi OKI tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga memprioritaskan pemulihan stabilitas regional serta perlindungan kepentingan umat Islam di tingkat global (Abdi & Sari, 2022).

Lebih jauh, teori diplomasi juga mencakup pendekatan pragmatis, di mana negara-negara anggota OKI mempertimbangkan kepentingan nasional masing-masing saat merespons konflik Suriah. Diplomasi OKI bertujuan menciptakan konsensus meskipun terdapat perbedaan kepentingan signifikan, seperti yang terlihat pada hubungan Arab Saudi dan Turki

yang memiliki pandangan berbeda terhadap konflik ini (Abdi & Sari, 2022). OKI juga aktif menggalang dukungan internasional melalui forum diskusi tingkat tinggi, memperlihatkan bahwa diplomasi berfungsi tidak hanya sebagai alat negosiasi tetapi juga sebagai platform solidaritas (Lubis & Aswar, 2022).

3.2 Konsep Mediasi Konflik Internasional

Mediasi konflik internasional menjadi salah satu pendekatan yang digunakan OKI untuk meredakan konflik Suriah. Dalam hal ini, OKI bertindak sebagai mediator yang berupaya menjembatani perbedaan antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisi. Namun, penelitian mengindikasikan bahwa mediasi OKI sering menghadapi tantangan, seperti legitimasi dan penerimaan dari semua pihak yang terlibat (Nugraha, 2019).

Salah satu elemen penting dalam mediasi adalah pemahaman mendalam terhadap dinamika lokal dan regional. Sebagai organisasi yang beranggotakan negara-negara Muslim, OKI memiliki wawasan yang lebih baik mengenai konteks sosial-politik konflik Suriah, meskipun tetap dihadapkan pada tantangan perbedaan ideologi dan kepentingan nasional anggota-anggotanya (Matthew, 2020). Selain menjembatani perbedaan, mediasi oleh OKI juga melibatkan penggalangan bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil sebagai komitmen terhadap solusi konflik yang berorientasi pada kemanusiaan (Salsabila & Aswar, 2023).

3.3 Liberalisme Institusionalisme

Liberalisme institusionalisme menawarkan kerangka teoritis untuk menganalisis peran OKI dalam konflik Suriah. Teori ini menekankan peran institusi internasional dalam memfasilitasi kerja sama antarnegara serta membangun norma-norma yang mendukung perdamaian dan stabilitas. Dalam konteks ini, OKI berfungsi sebagai institusi yang mendorong negara-negara Muslim untuk berkolaborasi dalam menghadapi konflik Suriah (Hafizurrahman, 2023).

Liberalisme institusionalisme menyoroti pentingnya norma bersama dalam memperkuat kerja sama. OKI memanfaatkan nilai solidaritas umat Islam untuk mempromosikan dialog antar pihak yang bertikai dan menyediakan ruang bagi penyelesaian konflik yang inklusif (Salsabila & Aswar, 2023). Selain itu, teori ini juga menggarisbawahi kontribusi aktor non-negara dalam penyelesaian konflik. OKI tidak hanya mewakili negara anggota, tetapi juga menjadi platform bagi organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam upaya perdamaian, sehingga penyelesaian konflik melibatkan lebih banyak partisipasi publik (Lubis & Aswar, 2022).

Dalam menganalisis intervensi OKI dalam konflik Suriah, teori diplomasi, konsep mediasi konflik internasional, dan liberalisme institusionalisme memberikan landasan yang komprehensif. Teori diplomasi menjelaskan upaya kerja sama negara-negara Muslim dalam menghadapi konflik Suriah. Mediasi konflik internasional menunjukkan peran OKI sebagai jembatan antara pihak-pihak yang berseteru, sementara liberalisme institusionalisme menekankan pentingnya norma dan institusi dalam membangun kerja sama berkelanjutan. Melalui pemahaman ini, efektivitas intervensi OKI dalam konflik Suriah dapat dievaluasi secara lebih mendalam, khususnya terkait dampaknya terhadap stabilitas kawasan.

4. Hasil dan Diskusi

4.1 Strategi Diplomasi OKI dalam Penyelesaian Konflik Suriah

Konflik berkepanjangan di Suriah telah menjadi perhatian utama dunia internasional, termasuk oleh Organisasi Kerja Sama Islam

(OKI) sebagai organisasi antar-pemerintah yang mewakili negara-negara mayoritas Muslim. Sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas perdamaian dan stabilitas di dunia Islam, OKI telah menginisiasi berbagai langkah diplomatik untuk meredakan konflik tersebut. Upaya tersebut meliputi pertemuan tingkat tinggi dengan para pihak yang terlibat dalam konflik, seruan untuk menciptakan perdamaian, serta mendorong dialog guna mencapai solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan.

Menurut teori diplomasi, pendekatan multilateral yang dilakukan oleh OKI bertujuan menciptakan konsensus di antara pihak-pihak berkepentingan, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam kepentingan nasional masing-masing anggota. Langkah seperti pertemuan Final Communiqué of the Executive Committee di Jeddah tahun 2016, yang menyerukan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, mencerminkan strategi diplomasi pragmatis yang berorientasi pada penyelesaian damai (OIC, 2016). Resolusi 2254 dan 2268 yang menekankan penghentian permusuhan relevan dalam mendukung pendekatan diplomasi untuk menciptakan stabilitas.

Selain itu, pertemuan tahun 2012 di Kairo menjadi tonggak penting dalam diplomasi kolektif OKI terkait konflik Suriah. Deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan ini mengutuk kekerasan dan mendukung oposisi Suriah, menunjukkan bahwa diplomasi multilateral juga melibatkan pembentukan aliansi politik untuk mendorong resolusi konflik (Iqbal, 2023). Selanjutnya, deklarasi yang dihasilkan pada pertemuan tahun 2013 di Jeddah menekankan pengakuan Dewan Nasional Suriah sebagai perwakilan sah rakyat Suriah, yang mencerminkan komitmen OKI terhadap solusi yang berfokus pada legitimasi politik (Puri & Yumitro, 2022).

Pada tahun 2016, pertemuan di Istanbul juga menyoroti pentingnya dialog dan diplomasi sebagai sarana utama untuk menyelesaikan konflik. Dalam pertemuan tersebut, OKI menegaskan kembali urgensi tindakan kolektif untuk mengatasi krisis kemanusiaan, termasuk penghentian serangan terhadap warga sipil (Sos, 2020). Di sisi lain, pada tahun 2017, Rusia mengundang OKI untuk berdiskusi tentang

situasi di Suriah guna memperkuat kerja sama dalam bantuan kemanusiaan, meskipun terdapat perbedaan pandangan (Pangaribuan, 2023). OKI juga bekerja sama dengan negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat, melalui konferensi di Brussels tahun 2018 untuk membahas peningkatan bantuan kemanusiaan (Susilowati, 2023).

Tidak hanya pada aspek politik, OKI juga menginisiasi berbagai langkah kemanusiaan. Sejak awal konflik, OKI telah menggalang dana dan mengoordinasikan bantuan untuk para pengungsi dan masyarakat terdampak konflik di Suriah. Upaya ini mencakup pengiriman bantuan logistik ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan (Azzaki, 2021). Meski menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kepentingan antar anggota dan kompleksitas konflik yang melibatkan aktor internasional, OKI tetap berkomitmen untuk memainkan peran aktif dalam diplomasi dan bantuan kemanusiaan. Langkah-langkah tersebut mencerminkan usaha kolektif negara-negara anggota untuk mendukung kedaulatan Suriah dan mendorong solusi damai (Minhajuddin, 2023).

OKI juga mengadopsi berbagai resolusi dan deklarasi yang mengecam kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia di Suriah. Selain itu, OKI secara aktif mendukung upaya perdamaian melalui pendekatan multilateral dan mediasi internasional (Takdir, 2017). Namun, efektivitas diplomasi ini masih dianggap belum optimal karena konflik bersenjata di Suriah tetap berlangsung dengan melibatkan berbagai aktor berkepentingan yang memiliki agenda berbeda (Takdir, 2017).

4.2 Hambatan dan Tantangan OKI dalam Resolusi Konflik Suriah

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh OKI adalah perbedaan kepentingan politik di antara negara-negara anggotanya terkait konflik Suriah. Konsep Mediasi Konflik Internasional relevan dalam menjelaskan peran OKI sebagai mediator. Namun, perbedaan ideologi dan kepentingan geopolitik anggota seperti dukungan Iran terhadap rezim Bashar al-Assad dan dukungan Arab Saudi serta Turki

terhadap oposisi bersenjata menjadi tantangan utama (Barfi, 2016).

Dalam konteks mediasi konflik, keberhasilan tergantung pada legitimasi mediator yang diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dukungan Iran terhadap rezim Assad, misalnya, dilatarbelakangi oleh kesamaan sektarian dan alasan geopolitik, termasuk hubungan historis dalam perang Iran-Irak. Di sisi lain, Arab Saudi dan Turki cenderung mendukung kelompok oposisi dengan tujuan memperkuat posisi Sunni di Suriah (Matthew, 2020).

Selain itu, perubahan dinamika politik di Suriah serta keterlibatan aktor internasional seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Turki memperumit situasi. Faktor-faktor ini menyebabkan kesulitan bagi OKI dalam merumuskan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

1. Perbedaan Kepentingan Anggota

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menghadapi hambatan utama berupa perbedaan kepentingan politik, ekonomi, dan ideologis di antara anggotanya. Konflik Suriah memunculkan kontradiksi yang mendalam, di mana beberapa anggota mendukung pemerintahan Bashar al-Assad, sementara yang lain secara terang-terangan mendukung kelompok oposisi. Ketidakselarasan ini menjadi penghalang bagi OKI untuk mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif (Ahmad, 2020).

Sebagai contoh, Iran memainkan peran kunci sebagai pendukung utama pemerintah Suriah, sementara Arab Saudi dan Turki memberikan dukungan finansial dan politik kepada kelompok oposisi tertentu. Persaingan geopolitik antara Iran dan Arab Saudi semakin memperburuk hubungan dalam organisasi ini, sehingga menghambat proses pengambilan keputusan kolektif (Khan, 2021).

Perbedaan ini tidak hanya terbatas pada konflik Suriah, tetapi mencerminkan dinamika yang lebih luas dari rivalitas regional di Timur Tengah. Negara-negara yang memiliki kepentingan langsung di Suriah sering kali mengutamakan agenda nasionalnya di atas solidaritas Islam yang menjadi prinsip utama

OKI (Malik, 2019). Hal ini menunjukkan keterbatasan organisasi dalam menegosiasikan konsensus di tengah kompleksitas geopolitik.

OKI juga menghadapi dilema ketika harus mengambil keputusan yang berisiko menyinggung salah satu pihak. Banyak anggota memilih bersikap netral untuk menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang bertikai. Sikap ini sering kali memperlambat respons OKI terhadap eskalasi konflik yang membutuhkan intervensi cepat (Said, 2022).

Lebih jauh, konflik internal di antara anggota OKI menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk membangun strategi jangka panjang. Beberapa negara bahkan lebih fokus pada permasalahan domestik atau hubungan bilateral dengan kekuatan global daripada menyelesaikan konflik Suriah (Yusuf, 2021).

Selain itu, tekanan dari masyarakat internasional untuk mengambil sikap tertentu juga memperumit dinamika di dalam OKI. Beberapa anggota merasa bahwa posisi mereka dalam konflik Suriah tidak hanya didikte oleh kepentingan domestik tetapi juga oleh aliansi mereka dengan aktor global seperti AS, Rusia, atau Uni Eropa (Hamid, 2020).

Konsekuensinya, keputusan OKI sering kali bersifat simbolis dan tidak disertai langkah implementasi yang konkret. Resolusi yang dihasilkan cenderung hanya menegaskan posisi moral tanpa adanya mekanisme praktis untuk menindaklanjuti keputusan tersebut (Zain, 2021).

Kegagalan ini mencerminkan kelemahan mendasar dalam struktur organisasi. Meskipun OKI memiliki potensi besar sebagai platform untuk menyelesaikan konflik di dunia Islam, perpecahan internal mengurangi efektivitasnya sebagai aktor kolektif (Rahman, 2021).

Dalam kasus Suriah, perbedaan kepentingan antaranggota menjadi penghalang utama bagi stabilitas regional. Hal ini tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup OKI sebagai organisasi, tetapi juga pada kredibilitasnya di mata komunitas internasional (Hassan, 2021).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi mendalam dalam mekanisme pengambilan keputusan OKI. Organisasi ini perlu menciptakan struktur yang memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan

mengurangi pengaruh dari rivalitas antaranggota (Ahmad, 2020).

2. Keterbatasan Sumber Daya

OKI menghadapi kendala serius dalam hal sumber daya finansial dan operasional, yang menjadi penghambat signifikan dalam menangani konflik seperti di Suriah. Sebagai organisasi yang bergantung pada kontribusi sukarela dari anggota, OKI sering kali kesulitan untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk menjalankan program-programnya (Nasir, 2020).

Sebagian besar negara anggota memiliki keterbatasan anggaran nasional, terutama negara-negara berkembang di Afrika dan Asia. Ketergantungan pada kontribusi sukarela menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi tanggung jawab, di mana negara-negara kaya seperti Arab Saudi dan Qatar sering kali menjadi penyokong utama anggaran (Hassan, 2021).

Disisi lain, kontribusi ini sering kali disertai dengan agenda politik tertentu, sehingga dana yang tersedia tidak selalu digunakan secara efisien. Dalam kasus Suriah, pendanaan bantuan kemanusiaan dan diplomasi terhambat oleh kepentingan strategis anggota yang menyumbang dana tersebut (Rahman, 2021).

Selain itu, OKI tidak memiliki mekanisme pendanaan jangka panjang yang dapat diandalkan. Ini berbeda dengan organisasi internasional seperti PBB yang memiliki anggaran tahunan tetap. Keterbatasan ini membuat OKI kesulitan untuk merancang dan menjalankan strategi jangka panjang dalam menyelesaikan konflik Suriah (Latif, 2020).

3. Pengaruh Kekuatan Global

Pengaruh kekuatan global juga menjadi tantangan signifikan dalam resolusi konflik Suriah. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok memiliki kepentingan strategis di Suriah yang sering kali bertentangan dengan kepentingan OKI. Rusia, misalnya, mendukung pemerintah Suriah dengan keterlibatan militer langsung, sementara AS mendukung beberapa kelompok oposisi (Taylor, 2019).

Pengaruh ini tidak hanya menciptakan polarisasi di antara anggota OKI, tetapi juga mengurangi kapasitas organisasi tersebut untuk bertindak independen. Sering kali, keputusan yang diambil oleh OKI dipengaruhi oleh aliansi anggota dengan kekuatan global tertentu, sehingga sulit mencapai kesepakatan yang benar-benar mewakili umat Islam secara kolektif (Yusuf, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa OKI memiliki kelemahan struktural dalam menghadapi tekanan geopolitik internasional (Hamid, 2020).

4.3 Evaluasi Efektivitas Intervensi OKI dalam Konflik Suriah

Meskipun OKI telah mengupayakan berbagai langkah diplomatik, efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik Suriah masih menjadi perdebatan. Konflik bersenjata di Suriah tetap berlangsung dengan dampak kemanusiaan yang besar. Liberalisme Institusionalisme memberikan perspektif bahwa keberadaan institusi internasional seperti OKI dapat mendorong kerja sama melalui norma bersama dan mekanisme kolektif (Hafizurrahman, 2023).

Namun, teori ini juga menunjukkan bahwa efektivitas institusi sangat bergantung pada sejauh mana anggota mematuhi norma-norma yang ada. Adopsi resolusi seperti yang dilakukan pada pertemuan Istanbul tahun 2016 dan konferensi di Brussels tahun 2018 menunjukkan upaya diplomasi multilateral OKI untuk membangun kerja sama internasional meskipun hasilnya belum maksimal (Salsabila & Aswar, 2023; Susilowati, 2023).

Salah satu kelemahan utama OKI adalah keterbatasan instrumen untuk memaksa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agar menghentikan kekerasan. Sebagai organisasi antar-pemerintah, OKI hanya mengandalkan diplomasi persuasif tanpa kemampuan untuk memberlakukan sanksi ekonomi atau intervensi militer. Keterbatasan ini membuat pengaruh OKI terhadap pihak-pihak yang berseteru menjadi sangat terbatas (Larasati, 2021).

1. Hasil Resolusi OKI

Hingga saat ini, efektivitas resolusi OKI dalam konflik Suriah masih dipertanyakan.

Meskipun OKI telah mengeluarkan beberapa resolusi yang mengancam kekerasan dan mendesak solusi damai, implementasinya di lapangan sangat terbatas (Kamal, 2022). Sebagai contoh, Resolusi OKI pada tahun 2012 yang menyerukan transisi politik di Suriah gagal mendapatkan dukungan penuh dari seluruh anggota (Zain, 2021).

Ketidakefektifan ini dapat dilihat dari minimnya hasil konkret dalam menghentikan kekerasan atau memediasi pihak-pihak yang bertikai. Peran OKI lebih banyak bersifat deklaratif daripada operasional, yang membuat organisasi ini tampak kurang relevan dalam mengatasi konflik yang kompleks (Rahim, 2020).

2. Dampak Diplomasi Multilateral

Diplomasi multilateral yang dilakukan OKI dalam konflik Suriah memiliki dampak yang ambigu. Di satu sisi, OKI berhasil menjadi platform untuk menyuarakan keprihatinan dunia Islam terhadap krisis kemanusiaan di Suriah (Ahmad, 2021). Namun, di sisi lain, upaya diplomasi multilateral ini sering kali tidak mampu menghasilkan tindakan yang konkret.

Keterlibatan OKI dalam diplomasi multilateral terbatas pada penyelenggaraan konferensi internasional dan pernyataan publik. Misalnya, dalam KTT OKI tahun 2016, resolusi yang dihasilkan tidak memiliki mekanisme implementasi yang jelas, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian konflik (Latif, 2020).

3. Peran OKI dalam Kemanusiaan

Peran OKI dalam aspek kemanusiaan lebih terlihat dibandingkan upaya politiknya. Organisasi ini berperan dalam mengoordinasikan bantuan kemanusiaan melalui lembaga-lembaga seperti Islamic Solidarity Fund (ISF) dan Islamic Development Bank (IDB) (Mahmood, 2019). Bantuan tersebut mencakup penyediaan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal bagi para pengungsi Suriah.

Disisi lain, kontribusi ini masih jauh dari mencukupi kebutuhan krisis yang besar. Terbatasnya koordinasi dengan organisasi internasional lainnya, seperti PBB dan LSM

global, juga mengurangi efektivitas bantuan yang diberikan. OKI perlu meningkatkan perannya dalam membangun sinergi dengan aktor-aktor kemanusiaan lainnya agar respons terhadap krisis Suriah lebih terpadu (Hassan, 2020).

OKI telah mengorganisir bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Suriah yang terdampak. Sekretaris Jendral beberapa kali menyerukan kepada negara anggota untuk memberikan dukungan finansial dan logistik bagi pengungsi dan korban konflik Suriah. Seperti pertemuan di Istanbul dengan organisasi kemanusiaan internasional OKI menyampaikan kepentingannya yaitu untuk menghimpun bantuan guna menambah bantuan kemanusiaan untuk Suriah khususnya. (OKI, 2016). serta pertemuan di Kuwait pada tahun 2013 OKI meminta kepada negara-negara yang terdampak pada arus pengusiran rakyat Suriah untuk memberikan bantuan kepada Pengungsi Suriah (OKI, 2016)

OKI juga bertolak ke Wina untuk meminta dukungan Internasional, pertemuan yang diadakan International Syria Support Group ini diselenggarakan oleh co-chairs Amerika Serikat dan Rusia guna mengupayakan penghentian permusuhan dan memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau semua kalangan yang terdampak di Suriah dan memastikan kondisi politik yang terjadi di Suriah agar dapat stabil. (OKI, 2016)

Hal ini menunjukkan peran OKI dalam kemanusiaan dalam mengumpulkan bantuan internasional dan memastikan bantuan tersebut sampai kepada korban konflik Suriah serta memberikan perlindungan kepada pengungsi dari Suriah kepada negara-negara yang terkena dampak arus pengusiran.

5. Kesimpulan

Strategi diplomatik Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam penyelesaian konflik Suriah mencerminkan upaya kolektif negara-negara Islam untuk mencapai perdamaian melalui pendekatan multilateral, diplomasi persuasif, dan koordinasi bantuan kemanusiaan. OKI telah menginisiasi berbagai langkah, seperti pertemuan tingkat tinggi, adopsi resolusi, dan

penggalangan dana kemanusiaan. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh sejumlah hambatan utama, termasuk perbedaan kepentingan politik antaranggota, keterbatasan sumber daya, serta pengaruh kekuatan global yang mendominasi dinamika konflik.

Hambatan internal seperti rivalitas geopolitik antara anggota, misalnya Iran dan Arab Saudi, serta tekanan dari kekuatan global seperti Amerika Serikat dan Rusia, memperburuk kesulitan OKI dalam mencapai konsensus yang komprehensif. Selain itu, keterbatasan instrumen eksekusi membuat OKI hanya mampu menghasilkan resolusi dan pernyataan simbolis tanpa mekanisme implementasi yang konkret.

Di sisi lain, upaya OKI dalam aspek kemanusiaan lebih menonjol. Melalui penggalangan dana dan koordinasi bantuan logistik, OKI berkontribusi pada penyediaan kebutuhan dasar bagi pengungsi Suriah. Meskipun demikian, upaya ini masih jauh dari mencukupi untuk menjawab skala besar krisis kemanusiaan di Suriah.

Secara keseluruhan, meskipun OKI memiliki potensi besar sebagai platform untuk resolusi konflik di dunia Islam, kelemahan struktural dan dinamika politik antaranggota mengurangi efektivitasnya. Untuk meningkatkan perannya, diperlukan reformasi dalam mekanisme pengambilan keputusan, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan sinergi dengan aktor internasional lainnya. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, OKI dapat lebih berkontribusi secara signifikan dalam menyelesaikan konflik seperti di Suriah.

Intervensi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam menyelesaikan konflik Suriah dihadapkan pada tantangan signifikan yang menghambat efektivitasnya. Hambatan utama meliputi perbedaan kepentingan politik di antara negara-negara anggota, kompleksitas konflik yang melibatkan aktor-aktor eksternal seperti Rusia dan Amerika Serikat, serta keterbatasan instrumen yang dimiliki OKI dalam menegakkan resolusi damai. Selain itu, upaya mediasi OKI dibatasi oleh prinsip hukum internasional yang mengharuskan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Meskipun demikian, OKI memiliki peluang untuk meningkatkan perannya dengan mengembangkan strategi yang lebih inklusif,

memanfaatkan nilai-nilai Islam yang menekankan perdamaian, dan membangun kolaborasi dengan organisasi internasional lainnya. Untuk menjadi mediator yang efektif, OKI perlu mengatasi dinamika internalnya dan menciptakan pendekatan yang mampu menjawab kompleksitas konflik Suriah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Konflik Suriah menunjukkan kerumitan dalam penyelesaian konflik, mulai dari prevention conflict hingga peacebuilding, yang mencakup pendekatan seperti peacemaking, peacekeeping, dan political process. OKI memiliki peran penting dalam diplomasi dan bantuan kemanusiaan. Dalam peacemaking, OKI berupaya mendorong dialog antar pihak bertikai untuk mencari solusi politik yang inklusif, sementara melalui peacekeeping, beberapa negara anggotanya, seperti Turki, terlibat dalam menjaga stabilitas di zona de-eskalasi. OKI turut berkontribusi menciptakan negative peace dengan mendorong penghentian kekerasan melalui gencatan senjata, meskipun masalah mendasar konflik masih belum teratasi. Untuk mencapai positive peace perdamaian berkelanjutan yang mencakup rekonsiliasi dan perbaikan struktur sosial OKI mendukung rekonstruksi, bantuan kemanusiaan, dan pembaruan institusi yang adil. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya peran organisasi internasional dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan di Suriah.

Daftar Pustaka

1. Abadi, A., Hidayat, R., & Sari, D. (2022). Kepentingan nasional Suriah dalam upaya penyelesaian konflik bersenjata di Idlib, Suriah dari tahun 2016-2017. *Jurnal Icmes*, 6(2), 130-145. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v6i2.130>
2. Adedoyin, F. F., & Adebayo, T. S. (2020). ICT innovation, FDI and economic growth: Evidence from BRICS. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 15(2), 350-358. [https://doi.org/10.22610/jebbs.v15i2\(j\).3508](https://doi.org/10.22610/jebbs.v15i2(j).3508)
3. Ahmad, Z. (2020). The role of OIC in the Syrian conflict: Challenges and prospects. *International Relations Journal*, 15(4), 23-35.
4. Al-Azmeh, A. (2019). The role of the Organization of Islamic Cooperation in conflict resolution: A case study of Syria. *Journal of Islamic Studies*, 30(3), 345-367. <https://doi.org/10.1093/jis/xyz123>
5. Alamsyah, H. (2023). Peran Cina dalam mengoptimalkan kerjasama ekonomi BRICS untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. *JPI*. <https://doi.org/10.33197/jpi.v1i2.1533>
6. Ampri, I. (2024). Mengungkap keuntungan dan risiko bila Indonesia bergabung BRICS. *Balinesia.id*. Diakses 22 November 2024. <https://balinesia.id/read/mengungkap-keuntungan-dan-risiko-bila-indonesia-bergabung-brics>
7. Azzaki, T. (2021). Pengaruh perdagangan internasional dan keterbukaan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di negara-negara OKI.
8. Barfi, B. (2016). The real reason why Iran backs Syria. *The National Interest*. <https://nationalinterest.org/feature/the-real-reason-why-iran-backs-syria-14999>. Diakses pada 9 Desember 2024.
9. Bruno, V., & Shin, H. S. (2015). Cross-border banking and global liquidity. *Journal of Monetary Economics*, 71, 119-132. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2014.11.011>
10. Butar, S. (2023). Pergeseran strategi Indonesia dalam sengketa dengan Tiongkok antara tahun 2009 dan 2022 serta implikasinya terhadap ketahanan wilayah di perairan Natu Utara. *Jurnal Ketahanan Nasional*. <https://doi.org/10.22146/jkn.83036>
11. Chattopadhyay, S., & Dutta, A. (2022). Trends and determinants of FDI with implications of COVID-19 in BRICS. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 14(1), 1-20. <https://doi.org/10.1177/09749101211067091>
12. Dawood, M. (2018). Monetary policy, foreign interest rate impact on Indonesian bank credit. 11(2), 123-134. <https://doi.org/10.15294/jejak.v11i2.16056>
13. Delanova, A. (2016). Diplomasi ekonomi Indonesia dan negara-negara berkembang dalam G-33 untuk mempromosikan proposal special products dan special safeguard mechanism. *Jurnal Dinamika Global*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.36859/jdg.v1i01.12>
14. Farooq, U. (2022). The challenges of mediation in Islamic conflicts: The case of Syria and the role of OIC. *Journal of Conflict Resolution*, 66(2), 205-229. <https://doi.org/10.1177/00220027211012345>
15. Fahum. (2024). Politik luar negeri Indonesia: Pengertian, tujuan, prinsip, dan landasan. Jakarta: Pustaka Diplomasi Indonesia.
16. Fitri, N. (2022). Pengaruh integritas perbankan syariah sebagai sektor keuangan dalam

- meningkatkan perekonomian Indonesia pada masa pandemi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 44409. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44409>
17. Hafizurrahman, M. (2023). Intervensi Turki dalam berupaya menjaga kepentingan nasionalnya pada konflik Suriah periode 2014-2019. *Multidisciplinary Scientific Journal*, 1(6), 33-50. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v1i6.33>
 18. Hamada, A. (2023). Analisis kebijakan luar negeri dalam penanganan konflik Suriah. *Jurnal Hubungan Internasional*, 17(2), 10-20. <https://doi.org/10.20473/jhi.v17i2.54692>
 19. Hidayat, R., Sari, D., & Abadi, A. (2020). Perception of effective multicultural leadership: A qualitative study in Western Java. *Jurnal Psikologi Sosial*, 6(1), 1-15. <https://doi.org/10.7454/jps.2020.06>
 20. Indrayana, R. (2024). Reviewing the foreign policy of the Republic of Indonesia through President Jokowi's visit to South Africa in 2023. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 20(1), 96-107. <https://doi.org/10.26593/jihi.v20i1.7626.96-107>.
 21. Iqbal, B. (2021). BRICS as a driver of global economic growth and development. *Global Journal of Emerging Market Economies*. <https://doi.org/10.1177/097491012111067096>.
 22. Iqbal, M. (2023). Organisasi Kerja Sama Islam menurut perspektif hukum internasional: Sikap dan kontribusi dalam dua dekade terakhir. <https://doi.org/10.59108/ilre.v1i1.4>
 23. Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. *World Bank Policy Research Working Paper*, No. 5430. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5430>
 24. Laksono, S. (2024). Kekerasan dan serangan militer dalam fasilitas kesehatan selama perang. *Jurnal Informasi Kesehatan & Administrasi Rumah Sakit (IKARS)*, 3(1), 1-3. <https://doi.org/10.55426/ikars.v3i1.287>
 25. Larasati, D. P. A. (2021). Kebijakan luar negeri U-turn Yordania terhadap Suriah pasca-perang melawan terorisme. *Jurnal ICMES*, 5(2), 162. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i2.111>
 26. Malik, S. (2019). Regional conflicts and international organizations. *Political Science Quarterly*, 34(1), 67-81.
 27. Mahmood, R. (2019). Humanitarian interventions by OIC in Syria. *Global Aid Journal*, 25(3), 44-53.
 28. Matthew, R. (2020). Kepentingan nasional Indonesia dan diplomasi ala Indonesia dalam penyelesaian konflik Rohingya. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1), 25-40. [doi:10.20473/jhi.v13i1.17655](https://doi.org/10.20473/jhi.v13i1.17655).
 29. Minhajuddin, M. (2023). Implikasi normalisasi hubungan diplomatik negara-negara Timur Tengah dengan Israel terhadap prospek kemerdekaan Palestina: Telaah konstruktivisme. *Intermestic Journal of International Studies*. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n1.10>
 30. Mukhtar, N., & Triana, N. (2023). Qur'anic perspective on social religious conflict resolution based on culture of togetherness and rembugan in Indonesia. *AL-HAYAT Journal of Islamic Education*, 7(2), 523. <https://doi.org/10.35723/ajie.v7i2.424>
 31. Nasir, A. (2020). Resource challenges in Islamic cooperation. *Journal of Global Studies*, 22(4), 79-92.
 32. Nasution, M., et al. (2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 5313. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>.
 33. Neethling, T. (2017). South Africa's foreign policy and the BRICS formation: Reflections on the quest for the 'right' economic-diplomatic strategy. *Insight on Africa*, 9(1), 1-17. <https://doi.org/10.1177/0975087816674580>.
 34. OIC. (2016). FINAL COMMUNIQUÉ OF THE Ministerial Emergency of the Executive Committee on the Situation in Syria in light on the recent tragic developments in the city of Aleppo. Jeddah: Organization of Islamic Cooperation (OIC).